

Implementation of Good Government Governance in Local Government: An Analysis of Financial Management and Transparency

Evan Nur Syahnani, Nur Laila Yuliani*, Betari Maharani

Akuntansi/ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia

*nurlailay@unimma.ac.id

ABSTRACT

Good government governance is a key factor in creating effective public administration. This study aims to examine and analyze the effects of local government apparatus performance, financial management, accountability, and transparency on the implementation of good government governance Utilizing primary data, the research population consists of 24 Local Government Agencies (OPD) in Magelang City. Sampling was conducted using a purposive sampling technique, yielding 70 respondents. The data were analyzed using multiple linear regression analysis. The results indicate that financial management and transparency have a positive effect on the implementation of good government governance. Meanwhile, the performance of local government apparatus has no significant effect on the implementation of good government governance.

Keywords: *apparatus performance; financial management; accountability; transparency; good government governance.*

Penerapan *Good Government Governance* di Pemerintah Daerah: Analisis Pengelolaan Keuangan dan Transparansi

ABSTRAK

Good government governance merupakan salah satu faktor dalam terciptanya tata kelola pemerintah yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kinerja aparatur pemerintah daerah, pengelolaan keuangan, akuntabilitas, dan transparansi terhadap penerapan *good government governance*. Data yang digunakan adalah data primer, dengan populasi 24 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Magelang. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 70 responden. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dan transparansi berpengaruh positif terhadap penerapan *good government governance*. Sementara itu, kinerja aparatur pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap penerapan *good government governance*.

Kata Kunci: *kinerja aparatur; pengelolaan keuangan; akuntabilitas; transparansi; good government governance.*

PENDAHULUAN

Ketetapan MPR-RI Nomor VI/2001 mengamanatkan agar Presiden membangun birokrasi Indonesia yang transparan, akuntabel, bersih dan bertanggungjawab, serta dapat menjadi pelayan masyarakat, abdi teladan masyarakat. Oleh sebab itu pada pembukaan

Rakornas PAN 2005 di Istana Negara oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyatakan, melaksanakan reformasi birokrasi, menegakkan dan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju pelayanan publik yang prima dan memberantas korupsi yang mulai dari diri sendiri serta menghindari perbuatan pidana korupsi.

Good Governance merupakan suatu konsep otonomi daerah untuk membangun pemerintah yang sehat dan bersih. Dalam menyelenggarakan *good governance* maka wajib adanya keseimbangan dengan pengelolaan pemerintah yang baik (Anggraini, Nugroho, & Susanto, 2024). Dalam konteks pemberantasan KKN, *good governance* dapat didefinisikan sebagai pemerintah yang bebas dari praktik KKN, namun sebagian besar dalam mendefinisikan *good governance*, tentang demokrasi yang membutuhkan budaya kewarganegaraan untuk menjaga kelangsungan demokrasi (Rahayu, 2022).

Karakteristik pelaksanaan *good governance* meliputi *transparancy*, *responsiviness*, *consensus orientation*, *equity*, *eficiency*, *effectiveness*, dan *accountability*. Karakteristik tersebut, paling tidak terdapat tiga hal yang dapat diperankan oleh Akuntansi Sektor Publik yaitu terwujudnya akuntabilitas, transparansi dan *value for money* (Wirawan, Yuliani, & Purwantini, 2019; Alamsyah, 2022). Tujuan mewujudkan tata kelola yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Dengan kata lain dalam reformasi birokrasi merupakan instrumen (*tools*) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional. Reformasi birokrasi merupakan perubahan yang signifikan yang diantaranya kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik (Setyowati & Yuliani, 2020; Nugraha & Novianty, 2022).

Penilaian kinerja aparatur daerah dapat dilihat melalui bagaimana tingkat komitmen organisasi tersebut. (Umam & Setiyowati, 2023) menjelaskan bahwa komitmen organisasi mengidentifikasikan tingkat keterikatan yang dimiliki setiap anggota terhadap suatu organisasi. Penyelenggaraan pemerintah yang mengimplementasikan *good governance* dapat diwujudkan jika manajemen penyelenggaraan pemerintah atau inerja aparatur pemerintah daerah yang baik dan andal meliputi manajemen yang kondusif, responsive, dan adaptif.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan orientasi pada kinerja yang menunjukkan suatu akuntabilitas kinerja yang saling berkaitan antara sasaran strategis untuk mencapai jumlah dana yang di alokasikan dan dapat diasumsikan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik memiliki pengaruh dalam meningkatkan kinerja suatu instansi atau organisasi (Nurhaeda & Tenriola, 2022). Praktik *good governance* adalah praktik penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi serta berorientasi pada kepentingan publik. Praktik penyelenggaraan negara dinilai baik jika

mampu mewujudkan transparansi, budaya hukum, dan akuntabilitas publik (Hoesada, 2016:121; Mardiasmo, 2009:20).

Tujuan penelitian ini adalah menguji kinerja aparatur pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan *good government governance* di kota Magelang karena BPK menemukan adanya suatu penemuan dan kelemahan dalam penyusunan laporan keuangan mulai dari tahun 2019-2023 antara lain pengelolaan aset tetap dan aset lainnya yang belum memiliki sepenuhnya sesuai dengan pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan BPK menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undang dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah.

METODE

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Magelang. Sampel diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sample*. Kriteria dalam penelitian ini yaitu:

- Kepala Dinas atau Badan, Kepala Bagian, Kepala Keuangan, Kepala Anggaran serta Pegawai Staf bagian keuangan.
- Memiliki masa kerja minimal 1 (satu) tahun.

Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan melalui kuesioner yang didistribusikan baik secara offline atau online dengan menggunakan Gform. Sedangkan untuk pengukurannya menggunakan skala Likert yaitu Sangat Setuju (SS) skor 5, Setuju (S) skor 4, Netral (N) skor 3, Tidak Setuju (TS) skor 2, Sangat Tidak Setuju (STS) skor 1. Definisi operasional dan pengukuran variabel dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Variabel Penelitian dan Pengukuran

Variabel	Definisi	Pengukuran
<i>Good government governance</i> (GGG)	<i>Good Government Governance</i> (Azzindani & M. Irwan, 2020).	Indikator: a. Responibilitas b. Independen c. Fairness (kesetaraan dan kewajaran)
Kinerja aparatur pemerintah (KAP)	Kinerja aparatur pemerintah daerah (Sari, Rice Haryati, & Dica Lady Silvera, 2023).	Indikator pengukuran yang digunakan (Sari et al., 2023).
Pengelolaan keuangan (PK)	Pengelolaan Keuangan (Vidyasari & Suryono, 2021).	Indikator pengukuran pengelolaan keuangan dilihat dari mekanisme proses penganggaran dan lain lain.
Transparansi (T)	Transparansi (Garung & Ga, 2020).	Indikator pengukuran transparansi yaitu keterbukaan, aksesibilitas, dan publikasi.

Sumber: Data primer diolah, 2026

Metode Analisa Data

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang menggunakan jenis data primer. Sumber data yang terdapat dalam penelitian ini berasal dari survei serta kuesioner yang disampaikan pada responden di Organisasi Perangkat Daerah Kota Magelang. Analisis data yang digunakan yaitu statistik deskriptif, uji validitas, reliabilitas, uji regresi linear berganda, uji koefisien determinasi, uji f, dan uji t.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif Responden

Statistik deskriptif responden menggambarkan urutan yang sangat terperinci terkait profil responden mengenai nama instansi, nama responden, jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan jabatan. Berdasarkan pendistribusian kuesioner yang telah dilakukan, maka profil responden disajikan dan dapat dilihat pada [Tabel 2](#).

Tabel 2. Statistik Deskriptif Responden

Keterangan	Kriteria	Jumlah Responden	Persentase
Jenis Kelamin	a. Laki-laki	41	58,6%
	b. Perempuan	29	41,4%
	Jumlah	70	100%
Usia	a. <30 Tahun	19	27,1%
	b. 30-40 Tahun	27	38,6%
	c. > 45 Tahun	24	34,4%
	Jumlah	70	100
Pendidikan Terakhir	a. SMA	-	-
	b. D3	15	21,4%
	c. S1	47	67,1%
	d. S2	8	11,4%
	Jumlah	70	100%
Lama Berkerja	a. <1 Tahun	8	11,4%
	b. 1-5 Tahun	26	37,1%
	c. < 5 Tahun	36	51,4%
	Jumlah	70	100%

Sumber: Data primer diolah, 2026

Reliabilitas dan Regresi Linier Berganda

Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada [Tabel 3](#), dan Hasil Regresi linier berganda pada [Tabel 4](#).

Tabel 3. Pengujian Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Kinerja aparatur pemerintah	0,921	Reliabel
Pengelolaan keuangan	0,855	Reliabel
Transparansi	0,894	Reliabel
Good government governance	0,937	Reliabel

Sumber: Data Primer diolah, 2026

Analisis Regresi Berganda

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3,543	0,681		5,200	0,000
Kinerja aparatur pemerintah	0,071	0,083	0,098	0,859	0,393
Pengelolaan keuangan	0,209	0,085	0,277	2,470	0,016
Transparansi	0,212	0,086	0,292	2,456	0,017

Sumber: Data primer diolah, 2026

Pembahasan

a. Pengaruh kinerja aparatur pemerintah terhadap penerapan *good government governance*

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa kinerja aparatur pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap penerapan *good government governance*. Hal ini berarti kinerja aparatur pemerintah daerah di organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Magelang belum dapat membantu dan mendorong terciptanya suatu tata kelola pemerintahan yang baik. Hal tersebut dikarenakan kinerja aparatur pemerintah lebih terkait dengan belum optimalnya pelaksanaan program secara efektif dan efisien. Hal ini tidak sejalan dengan *theory stewardship*, yang menyatakan kinerja aparatur pemerintah yang dimiliki oleh organisasi perangkat daerah dapat memberikan pengaruh dan menciptakan sistem tata kelola pemerintah yang baik (*good government governance*). Adanya peningkatan dalam pelayanan publik dalam membantu masyarakat sebagai *principal* oleh OPD sebagai *steaward* belum dapat meningkatkan *good government governance*. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang menyatakan bahwa kinerja aparatur pemerintah berpengaruh terhadap *good government governance* (Haura, Junita, & Meutia, 2019; Sari et al., 2023; Wongkar, Senduk, & Tanor, 2021). Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang menyatakan bahwa kinerja aparatur pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap *good government governance* (Destriana, w.h., Sugandi, Y.S., & Saputra, 2023; Pardana & Intan, 2024; Sunarmo, Widianingsih, Pratiwi, & Hidayat, 2018).

b. Pengaruh pengelolaan keuangan terhadap penerapan *good government governance*

Bedasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa penggunaan pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap *good government governance*. Hal ini memberikan arti bahwa pengelolaan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Magelang dapat meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik atau *good government governance*. Hal tersebut dikarenakan pengelolaan keuangan oleh OPD Pemerintah Kota Magelang telah dilakukan dengan baik sesuai dengan aturan dan pedoman yang ada. Hal

ini sejalan dengan *theory stewardship* yang menyatakan bahwa penerapan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah dapat mendorong Pemerintah Kota Magelang dalam menjalankan tatanan pemerintah yang baik. Hal tersebut dapat terjadi karena Pemerintah Kota Magelang sendiri memberikan suatu informasi pengelolaan keuangan secara akuntabel dan transparan yang menjadi salah satu konsumsi masyarakat selaku principal yang ikut mengawasi dan mengawal jalannya pengelolaan keuangan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap *good government governance* (Alamsyah, 2022; Mbipi, Assih, & Sumtaky, 2021; Prabawa, Karamoy, & Mawikere, 2020; Sari et al., 2023). Sedangkan hasil penelitian tidak konsisten dengan penelitian yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan tidak berpengaruh terhadap *good government governance* (Cahaya Putra & Romli, 2022; Sagita, Musnadi, Shabri, & Majid, 2018; Septariani, 2018).

c. Pengaruh transparansi terhadap penerapan *good government governance*

Bedasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap penerapan *good government governance*. Hasil tersebut berarti bahwa transparansi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Magelang dapat meningkatkan penerapan *good government governance*. Hal tersebut mencerminkan bahwa pemerintah Kota Magelang memberikan informasi secara terbuka kepada publik atau masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dan program kerja yang ada. Hal tersebut sejalan dengan *theory stewardship* yang mana transparansi menjadi salah satu bentuk keterbukaan informasi yang diberikan ke publik atau masyarakat sebagai *principal* dan bentuk kebertanggungjawaban aparat perangkat daerah sebagai *steawaed* untuk mengumumkan kebijakan anggaran dan mudah diakses oleh publik. Hasil Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap *good government governance* (Fransisca, Saiful, & Aprila, 2021; Laoli, 2019; Merchilia & Robinson, 2024). Sedangkan penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh yang menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap *good government governance* (Asmoro & Setianingsih, 2019; Iswahyudi, Triyuwono, & Achsin, 2017; Maolani, 2023).

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kinerja aparat pemerintah daerah, pengelolaan keuangan, akuntabilitas, dan transparansi terhadap *good government governance* yang ada di wilayah Organisasi Perangkat Daerah Kota Magelang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 96 responden yang

mencakup kepala dinas atau badan, kepala keuangan, kepala bagian, dan staf atau karyawan bagian keuangan.

Kinerja aparatur pemerintah, dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap *good government government*. Tata kelola pemerintah yang baik menjadi salah indikator penilaian yang diberikan kepada pemerintahan kota magelang dikarenakan menjalan proses ke pemerintah sesuai anjuran dan program yang telah dibentuk oleh pemerintah itu sendiri. Kinerja aparatur pemerintah menjadi salah satu tolak ukur jika petugas kantor mulai dari kepala dinas atau badan, kepala keuangan, kepala bagian, staf atau karyawan menjalankan tugas dengan baik dan sesuai fungsinya. Akuntabilitas menjadi alat ukur dalam melihat dan menilai sebagai pertanggungjawaban aparatur pemerintah daerah kepada stakeholder. Melihat kinerja aparatur pemerintah daerah dalam bagian pertanggung jawaban dan sistem yang digunakan dalam manajemen produk administrasi dan bagian prosedur yang digunakan untuk melaksanakan tugas dengan baik dengan mempertimbangkan suatu prinsip efisiensi untuk menghasilkan kinerja yang maksimal.

Sedangkan pada pengelolaan keuangan dan transparansi tidak berpengaruh terhadap *good government governance*. Dalam tata kelola pemerintah yang baik, pengelolaan keuangan memiliki faktor yang sangat penting dalam bagian pertanggungjawaban di masing-masing instansi, dinas, atau badan. Pengelolaan keuangan dalam suatu instansi, dinas, atau badan masih sangat sering kali terdapat adanya evaluasi kinerja dalam pengelolaan keuangan tersebut dan instansi, dinas atau badan dalam proses akuntansi dan pengelolaan keuangan akan selalu melakukan evaluasi kinerja pengelolaan guna mengantisipasi dan menindaklanjuti langkah atau keputusan yang diambil. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik proses transparansi menjadi salah keterbukaan informasi yang dilakukan oleh dinas, atau badan dalam menginformasikan kepada publik terkait pengelolaan keuangan dan publik dapat mengetahui laporan pertanggung jawaban tahunan dengan tepat waktu dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah. (2022). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Pare-Pare. *Journal of Economic Perspectives*, 2(1), 1–4.
- Anggraini, A. D., Nugroho, W. S., & Susanto, B. (2024). Pengaruh Pengungkapan Intellectual Capital, Good Corporate Governance, dan Green Accounting terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi. *UMMagelang Conference Series*, 10–24.
- Asmoro, W. K., & Setianingsih, N. A. (2019). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana “Prodamas” dalam Mewujudkan Good Government Governance di Tingkat Kelurahan Pemerintahan Kota Kediri. *Owner*, 3(2), 270. <https://doi.org/10.33395/owner.v3i2.171>
- Azzindani, R., & M. Irwan. (2020). Implementasi SIMDA dan Kinerja Aparatur

- Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dimediasi Good Government Governance. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 31–54. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v3i1.31>
- Cahaya Putra, V. D., & Romli, R. (2022). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Good Government Governance terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Bandung. *Portofolio: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen, Dan Akuntansi*, 17(1), 46–65. <https://doi.org/10.54783/portofolio.v17i1.195>
- Destriana, w.h., Sugandi, Y.S., & Saputra, G. . (2023). Pengaruh Implementasi Kebijakan E-Government Dan Tata Kelola Pemerintah Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut. *Administration and Education Management*, 6, 303–313.
- Fransisca, F., Saiful, S., & Aprila, N. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu. *Jurnal Fairness*, 8(3), 171–182. <https://doi.org/10.33369/fairness.v8i3.15207>
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 19–27. <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>
- Haura, G. A., Junita, A., & Meutia, T. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Pengelolaan Keuangan Daerah, Dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Good Governance Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada SKPK di Kota Langsa). *Jurnal Penelitian Ekonomi ...*, 3(1), 33–52.
- Iswahyudi, A., Triuwono, I., & Achsin, M. (2017). Hubungan Pemahaman Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Value For Money dan Good Governance (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Lumajang). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 151–166. <https://doi.org/10.23887/jia.v1i2.9992>
- Laoli, V. (2019). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value of Money pada Pemerintah Kabupaten Nias. *Owner*, 3(1), 91. <https://doi.org/10.33395/owner.v3i1.108>
- Maolani, D. Y. (2023). Penerapan Sistem Akuntabilitas Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 3.
- Mbipi, S. D., Assih, P., & Sumtaky, M. (2021). Pengelolaan Keuangan Daerah dan Good Governance terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 3(2), 152–158. <https://doi.org/10.26905/afr.v3i2.5503>
- Merchilia, S., & Robinson. (2024). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bengkulu. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(4), 5326–5338. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i4.1134>
- Nurhaeda, A., & Tenriola, A. (2022). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

- Kabupaten Sinjai. *Tangible Journal*, 7(2), 161–170. <https://doi.org/10.53654/tangible.v7i2.304>
- Pardana, D., & Intan, N. (2024). *Pengaruh Penerapan Good Government Governance Dan Kinerja Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Se-Kecamatan Lasalimu Universitas Muhammadiyah Buton , Indonesia Info Article Received : Revised : Accepted : Publication : Keywords : Good*. 3(01), 66–84.
- Prabawa, S., Karamoy, H., & Mawikere, L. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Good Governance (Studi Empiris Di Kabupaten Minahasa). *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 269. <https://doi.org/10.32400/gc.15.2.28232.2020>
- Rahayu, I. (2022). Pengaruh Penerapan Good Government Governance Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kabupaten Bandung Barat). *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 9(8), 2869–2879.
- Sagita, A. D., Musnadi, S., Shabri, M., & Majid, A. (2018). Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Berbasis Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Jaya. *Jurnal Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unsyiah*, 2(1), 11–21.
- Sari, R. P., Rice Haryati, & Dica Lady Silvera. (2023). Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penerapan Good Governance (Studi Kasus di Kecamatan Koto XI Tarusan). *Ekasakti Pareso Jurnal Akuntansi*, 1(2), 183–192. <https://doi.org/10.31933/epja.v1i2.852>
- Septariani, J. (2018). Penerapan Konsep Value for Money Pada Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Good Government Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) Pada Kabupaten Musi Banyuasin. *BALANCE Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 2(1), 158. <https://doi.org/10.32502/jab.v2i1.1169>
- Setyowati, I., & Yuliani, N. L. (2020). Antecedent Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *UMMagelang Conference Series*, 174–186.
- Sunarmo, A. S., Widianingsih, R. W., Pratiwi, U. P., & Hidayat, T. H. (2018). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Government Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Kompetensi Sdm Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 16(1), 9–18. <https://doi.org/10.31603/bisnisekonomi.v16i1.2126>
- Vidyasari, F. N., & Suryono, B. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1–24.
- Wirawan, R. C., Yuliani, N. L., & Purwantini, A. H. (2019). Antecedent Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada OPD Pemerintah Daerah Kota Magelang). *Wahana Riset Akuntansi*, 7(2), 1551–1566.
- Wongkar, D. L., Senduk, V., & Tanor, L. (2021). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2(1), 1–7. <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i1.630>